



# Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata di Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun

Ainul Latifah Br Simamora\* dan Zoraya Alfathin Rangkuti

Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan-Indonesia

Email: [latifahainul56@gmail.com](mailto:latifahainul56@gmail.com)

**How to Cite:** Simamora, A. L. B., & Rangkuti, Z. A. (2024). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata di Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 9(1); 62-73. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.9.1.2024.62-73>

## Abstract

*The Village Owned Enterprises Program (BUMDES) is a form of program established by the Village Government to improve the village economy through developing the village's potential. BUMDES aims to improve the village economy, increase community businesses in managing village economic potential. However, in practice it is still not targeted and there is no change in the independence of the people in the village. This research aims to determine and evaluate BUMDES in the Development of Tourism Villages in Nagori Karang Anyar. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out using interviews, observation, documentation, and literature techniques. Qualitative data analysis using the CIPP evaluation model theory approach (Context, Input, Process, Product) proposed by Daniel Stufflebeam (1993). The results of the research show that in the implementation of the BUMDES context evaluation there are still problems in developing business activities that are not yet optimal. However, judging from the target, it is in accordance with the provisions marked by improving infrastructure and developing types of business. Then, in the evaluation of inputs in its implementation was not transparent and did not understand the procedures for implementing BUMDES activities, causing the implementation to not receive a good response from the community. Then the process evaluation shows that program implementation is not in accordance with the implementation that is not in accordance with the implementation plan, indicated by business activities whose implementation is not optimal. And the product evaluation (results) shows that the presence of BUMDES in Nagori Karang Anyar in developing tourist villages is still not optimal in its implementation. In the Management of program implementation, there are still problems that cause the program to experience many obstacles, including the lack of Village Government supervision in the continuity of BUMDES in Nagori Karang Anyar.*

**Keywords:** Evaluation; village owned enterprise program; tourism village development

## Abstrak

Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan suatu bentuk program yang dibentuk oleh Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi yang dimiliki desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum tepat sasaran dan masih banyak masyarakat yang belum menunjukkan perubahan kemandirian dalam pelaksanaan program tersebut dalam mengembangkan objek wisata menjadi desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi BUMDES dalam Pengembangan Desa Wisata di Nagori Karang Anyar. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltiandeskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan. Data analisis secara kualitatif dengan pendekatan Teori Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang

dikemukakan oleh Daniel Stufflebeam (1993). Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi konteks dalam pelaksanaannya BUMDES masih terdapat permasalahan dalam mengembangkan kegiatan usaha yang belum optimal. Namun dilihat dari sarasannya sudah sesuai dengan ketentuan ditandai dari perbaikan infrastruktur dan pengembangan jenis usahanya. Kemudian pada evaluasi masukan dalam pelaksanaannya pihak pelaksana kegiatan tidak transparan dan tidak memahami prosedur pelaksanaan kegiatan sehingga menyebabkan pelaksanaannya tidak mendapat respon baik dari masyarakat. Lalu pada evaluasi proses (process) menunjukkan pelaksanaan program belum sesuai dengan rencana pelaksanaan dan pelaksana program. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaannya yang belum sesuai dengan rencana pelaksanaan dilihat dari kegiatan usaha yang pelaksanaannya belum optimal. Terakhir pada evaluasi hasil (product) menunjukkan bahwa hadirnya BUMDES di Nagori Karang Anyar dalam mengembangkan desa wisata masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Masih terdapat permasalahan yang menyebabkan program mengalami kendala diantaranya kurang pengawasan yang dilakukan dalam keberlangsungan BUMDES di Nagori Karang Anyar.

**Kata Kunci:** Evaluasi; program badan usaha milik desa; pengembangan desa wisata

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki cita-cita dalam mensejahterahkan seluruh rakyatnya. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinie IV yang menjelaskan tentang Tujuan Negara Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah Indonesia melakukan Pembangunan Nasional dengan upaya-upaya serta strategi untuk dapat mencapai kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan Nasional adalah upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat indonesia (Heliarta, 2019).

Pembangunan Nasional dapat dimulai dari ruang lingkup Pemerintah Daerah karena penduduk Indonesia sebagian besar mayoritas bertempat tinggal di Daerah pedesaan, sehingga desa menjadi standar dalam mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat indonesia. Desa dianggap sebagai miniatur sebuah negara karena di dalam desa terdapat masyarakat, pemerintahan, wilayah, sumber daya, dsb. Namun realitanya, desa justru terabaikan di mana selama ini pengembangan ekonomi dan pembangunan dipusatkan di kota. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara desa dan kota. Desa tidak diberi keleluasaan mengolah potensi yang dimilikinya, yang terjadi justru potensi desa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi perkotaan. Sejalan dengan perubahan iklim politik dan pergantian pemerintahan yang diikuti dengan pergeseran paradigma pembangunan bertujuan supaya daerah dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerahnya. Hal tersebut memberikan peluang bagi desa untuk dapat memanfaatkan mengelola dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. adapun salah satu gagasan pemerintah untuk membangun perekonomian desa yaitu melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibangun dan dikuasai setiap pemerintah desa dan dijalankan oleh masyarakat secara ekonomis, mandiri dan profesional menggunakan modal semuanya atau sebagian besar dari Kekayaan Desa yang disisihkan. Pendirian BUMDES di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diamanatkan melalui Pasal 87 ayat (1) dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2015 mengenai Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran BUMDES yang bertujuan (1) Menaikkan Perekonomian Desa, (2) Memaksimalkan aset desa guna kesejahteraan desa, (3) Menaikkan usaha masyarakat dalam menata potensi ekonomi desa, (4) Mengembangkan skema kerjasama usaha antar desa dan/atau sama pihak ketiga, (5) Membentuk peluang dan jaringan pasar untuk menunjang kebutuhan layanan umum warga, (6) Menyediakan lapangan kerja, (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melewati perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, (8) Menaikkan penghasilan masyarakat desa dan penghasilan Asli Desa BUMDES sebagai penguat solidaritas dan daya tawar kolektif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Cara Kerja BUMDes adalah

dengan jalan menampung kegiatan- kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa, hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Setiap unit usaha yang berada di desa harus berada di bawah naungan BUMDES (Bawole et al., 2023).

Desa Wisata sebagai salah satu program yang digunakan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh setiap desa. Saat ini sejumlah daerah yang mulai memprakarsai dan mengembangkan Desa Wisata (Nugroho, 2014). Desa Wisata adalah desa yang mempunyai tempat wisata baik alam, wisata budaya dan wisata buatan manusia yang dikembangkan langsung oleh masyarakat desa. Sehingga dengan adanya pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Sidoarjo kedepannya akan dapat membawa dampak baik untuk peningkatan pendapatan ekonomi bagi setiap Pemerintah Desa. Akan tetapi, sangat disayangkan sekali bahwa saat ini BUMNAG Anyar Lestari mayoritas mengembangkan potensi desanya melalui bidang penyewaan dan perdagangan saja. Walaupun sudah mulai dilakukan pembangunan untuk tempat wisata yang untuk menarik mata masyarakat, tetapi masih dalam tahap pembangunan.

Dalam pengembangan desa wisata melalui objek wisata dilakukan secara bertahap melalui beberapa kegiatan. Dalam operasionalisasinya BUMNAG Anyar Lestari sudah memiliki beberapa kegiatan/program sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas beserta manfaatnya, diantaranya meliputi infrastruktur, daya tarik wisata, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengembangan Usaha. Adapun kegiatan tersebut diantaranya terdiri dari beberapa aspek yaitu Infrastruktur meliputi pembangunan tembok anti banjir dan menutup saluran air pada jalan masuk area wisata anyar lestari. Kegiatan ini termasuk kedalam aspek ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan objek wisata melalui pembangunan yang dilaksanakan. Kemudian program daya tarik wisata dengan menambah tempat teduh atau pondok, membuat jembatan penyebrangan dan lain sebagainya. Kegiatan ini termasuk kedalam aspek sosial, ekonomi dan budaya karena bertujuan untuk menambah daya tarik dan fasilitas pengunjung serta menambah tempat lesehan wisatawan yang berkunjung dan juga meningkatkan kualitas desa dengan pengembangan yang dilakukan. Selain itu program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang termasuk ke dalam aspek sosial dan budaya karena dilaksanakan oleh masyarakat desa itu sendiri dengan pelatihan melayani wisatawan, pelatihan penyajian dan pelayanan pengunjung.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan, sesuai dengan ditemukannya beberapa masalah yang terjadi di Objek Wisata Karang Anyar, diantaranya BUMNAG sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat namun belum maksimal dikarenakan terbatasnya anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang, kesiapan dana usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelola usahapun akan mengalami kemunduran. Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa keberadaan BUMNAG dalam mengelola program kegiatan usaha di tengah masyarakat masih mengalami kendala terutama terbatasnya anggaran yang dimiliki. Selain itu peneliti juga menemukan permasalahan yaitu minimnya sumber daya manusia dan tata kelola yang tidak berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat sengaja dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan. Keberadaan BUMNAG sebagai instrument dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan dan menyusun beberapa identifikasi masalah yang terjadi di BUMNAG Anyar Lestari yakni Pertama, permasalahan anggaran yang tidak cukup untuk mengembangkan kegiatan atau program dalam berlangsungnya BUMNAG dalam mengembangkan objek wisata. Anggaran sangat

diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana kegiatan. Sebagaimana terlihat di lapangan terdapat beberapa kegiatan usaha yang berhenti dilanjutkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan program tidak dapat berjalan dengan baik dalam mengembangkan objek wisata karena keterbatasan anggaran yang didapatkan dari pemerintah. Kedua, masih kurangnya peningkatan kualitas SDM Pengelola BUMNAG. Peran Pengelola BUMNAG sangat penting dalam keberlangsungannya. Seperti halnya mencari tahu bagaimana BUMNAG dari desa lain sebagai referensi dan memahami bagaimana tata pelaksanaan unit tersebut dengan antrian memerlukan persiapan yang matang agar hasil yang diinginkan tercapai.

Adapun sebagai bahan referensi dan yang menjadi pembeda antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang ingin peneliti teliti, penulis mengambil segi penerapan Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Tarnando, 2021) tentang Evaluasi Program Pengembangan Obyek Wisata Danau Sungai Sorik di Kecamatan Kuantan Hilir seberang. Hasil penelitian dalam mengembangkan obyek wisata melalui program BUMDES sudah cukup baik dimana terdapat program yang telah dilaksanakan yaitu program pembenahan serta rehabilitas Taman timbang bunga pengantin, pondok terapung, penambahan sepeda air, pembuatan ruang tunggu sepeda air dan juga fasilitas yang ada. Tetapi, dalam penerapannya masih kurang maksimal. Penelitian kedua dilakukan oleh (Maulidiah & Megawati, 2022) tentang Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi pada BUMDES Sambimadu Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo). Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan BUMDES dalam pengembangan desa wisata belum sepenuhnya berhasil karena sumber daya manusia yang dimiliki BUMDES Sambimadu masih belum memadai dan berkompeten. Penelitian ketiga dilakukan oleh (Nugraha & Kismartini, 2019) Hasil penelitian menunjukkan Penyelenggaraan BUMDES Reja Mulyo belum maksimal dikarenakan kontribusi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat masih kurang sehingga masih perlunya pembenahan.

Dari ketiga penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini, persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Obyek Wisata. Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu terletak pada Indikator, Lokasi Penelitian serta teori yang digunakan. Pada Penelitian ini menggunakan Indikator Evaluasi dan dilakukan di Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dan menggunakan teori Model evaluasi dikemukakan oleh Stufflebeam yang menyangkut 4 aspek yaitu : Evaluasi Context, Input, Process, dan Output (CIPP). Dalam pelaksanaan BUM Nagori di bidang pariwisata, perlu dilakukan pemantauan serta evaluasi untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan program dalam pembangunan Kepariwisata Nasional. Namun peneliti menemukan, Nagori Karang Anyar masih belum memiliki tim evaluator dalam pelaksanaannya. Maka dari itu peneliti menilai perlu adanya tim evaluator dalam proses pelaksanaan Program BUMDes di Nagori Karang Anyar terhadap pengembangan Desa Wisata untuk melihat sejauh mana program berjalan serta melihat kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Berdasarkan Penjelasan diatas dan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Nagori Karang Anyar aka perlu dilakukan Evaluasi agar kedepannya Program ini bisa berjalan dengan baik mungkin dan tentunya tepat sasaran. Kemudian juga dapat memastikan bahwa program ini benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi yang dimiliki desa. oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Obyek Wisata di Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun”.

## **2. KONSEP DAN TEORI**

### ***Evaluasi Program***

Menurut (Stufflebeam & Zhang, 2017) Evaluasi adalah suatu proses menilai, mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan sebuah kebijakan atau program yang hasilnya sudah sesuai belum dengan apa yang sudah direncanakan secara efektif dan efisien. Evaluasi Program dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau tidak dengan cara mengetahui efektivitas, masing-masing komponennya melalui rangkaian informasi yang diperoleh oleh evaluator. Selain itu Evaluasi Program menurut Cronbach dan Stufflebeam (Arikunto & Jabar, 2018) adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengumpul keputusan. Indikator Evaluasi Program yang digunakan yaitu Model Evaluasi Context, Input, Process, Product (CIPP) yang dikembangkan oleh (Stufflebeam & Zhang, 2017) pada 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA (The elementary and Secondary Education Act). Ada beberapa kriteria yang dimiliki oleh Evaluasi Meta yang dikemukakan oleh Stufflebeam yaitu, Validitas Internal, Validitas Eksternal, Realibiity, Objektivitas, Relevansi, Importance, Cakupan, Kredibilitas, Ketepatan Waktu, perembesan dan efektivitas biaya.

### ***Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)***

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu wujud dari otonomi daerah (Saebani et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik (Yarni et al., 2023). Untuk mengelola potensi ekonomi desa, pemerintah mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Sopia Rukmana et al., 2023). Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES harus sesuai dengan tujuannya sebagaimana dalam pasal 3 Permendesa No 4 Tahun 2015 yang menyatakan tujuan dibentuknya BUMDES yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendaatan asli desa.

### ***Desa Wisata***

Menurut (Damanik, 2005) Desa Wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang dapat dimanfaatkan berdasarkan kemampuan unsur- unsur yang memiliki atribut produk wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi dan penginapan. Mengutip penyertaan Haridwjoyo (2012) menjelaskan mengenai kriteria yang dimiliki desa wisata yaitu (1) Aksesibilitasnya baik sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi; (2) Memiliki objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai objek wisata; (3) Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisawatan yang datang ke desanya; (4) Keamanan di desa tersebut terjamin; (5) Tersedia akomodasi, telekomunikasi dan tenaga kerja yang memadai; (6) Beriklim sejuk atau dingin; (7) Berhubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Masyarakat lokal berperan sebagai tuan rumah dan menjadi pelaku penting dalam pengembangan desa wisata dalam keseluruhan tahapan mulai tahap perencanaan, pengawasan dan implementasi. Tujuan desa wisata diantaranya adalah

Masyarakat memiliki kesadaran akan peluang dan kesiapan menangkap manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat; Meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah; dan Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta Pesona bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat dan memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah (Noviana et al., 2023).

### **3. METODE**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah ((Moleong, 2007). Adapun Lokasi Penelitian yang akan diteliti yaitu berada di Objek Wisata Pemandian Alam Karang Anyar yang terletak di Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data yang akurat, maka peneliti memilih informan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015), yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pengembangan Desa Wisata di Nagori Karang Anyar***

Untuk mengetahui secara jelas terkait Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengembangkan desa wisata di Nagori Karang Anyar, peneliti menggunakan teori Model Evaluasi Program CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam. Adapun model evaluasi CIPP terdiri kedalam 4 indikator, yaitu :

#### *Evaluasi Konteks (context evaluation)*

Evaluasi konteks bertujuan untuk menilai apakah tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan memenuhi kebutuhankebutuhan pihak-pihak yang menjadi sasaran organisasi (Mahmudi, 2011). Badan Usaha Milik Desa pada penelitian ini berada di Nagori Karang Anyar yang diatur kedalam Peraturan Nagori No 06 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagori (BUMNAG) Anyar Lestari merupakan desa yang mendirikan BUMNAG sebagai instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pangulu Nagori Karang Anyar diketahui bahwa dalam pelaksanaannya BUMNAG telah banyak melakukan perubahan terlebih dalam perbaikan dari objek wisata tersebut yang meliputi perbaikan infrastruktur dan sarana & prasarana. Pengembangan tersebut juga didukung dengan tujuan dibentuknya BUMNAG yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan daya tarik wisata objek wisata agar dapat menjadikan Nagori sebagai desa wisata. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi program pengembangan kegiatan usaha dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, hasil wawancara dengan Direktur BUMNAG dan Sekretaris BUMNAG Karang Anyar juga diketahui bahwa BUMNAG bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan nagori serta meningkatkan usaha masyarakat dalam

pengelolaan potensi ekonomi Nagori. mengembangkan Objek Wisata dengan melakukan perbaikan yang meliputi infrastruktur, pengembangan SDM serta pengembangan usaha untuk meningkatkan daya tarik wisata pengunjung dalam mensejahterahkan masyarakat. Pendirian BUMNAG difokuskan dalam pengembangan potensi yang dimiliki Nagori dengan harapan dapat memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat Nagori dengan Mayoritas penduduk Nagori Karang Anyar yaitu Menengah ke bawah dengan mata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai meminimalisir pengangguran atau menciptakan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat Nagori Karang Anyar .

#### *Evaluasi Masukan (Input evaluation)*

Evaluasi ini mengidentifikasi problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas- prioritas, dan membantuk kelompok-kelompok pemakai untuk lebih luas menilai tujuan, prioritas, dan manfaat dari program, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk fasibilitas dan potensi untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan (Kurniawati et al., 2021). Hasil wawancara terkait dengan Pengawasan Pengelolaan BUMNAG diperoleh bahwa Pengelolaan BUMNAG dilakukan laporan kegiatan setiap bulannya, terutama pada unit usaha dalam pengembangan objek wisata yang banyak membantu masyarakat-masyarakat kecil di Nagori Karang Anyar. Sebagaimana dari pengembangan kegiatan usaha yang dibentuk dan dilaksanakan, terdapat salah satunya yaitu kegiatan usaha retribusi kebersihan mendapatkan keresahan. Kegiatan tersebut berupa pengutipan iuran terhadap pengunjung objek wisata yang dilaksanakan oleh Kelompok Sadar Wisata (PORDAKWIS) dengan tujuan untuk kebersihan di Objek Wisata Karang Anyar. selanjutnya PORDAKWIS yang akan melaksanakan kegiatan kebersihan di Objek Wisata tersebut atau membayar orang dengan iuran yang dihasilkan untuk membersihkan kebersihan tersebut. Kegiatan Usaha ini diatur kedalam Peraturan Nagori No 9 Tahun 2020 tentang Iuran Kebersihan. Kegiatan ini banyak membantu masyarakat dalam kegiatan kebersihan di Objek Wisata dan dalam pengembangannya dalam objek wisata. Seiring berjalannya kegiatan tersebut mendapatkan permasalahan diantaranya kegiatan yang tidak didukung oleh masyarakat sekitar karena dianggap kegiatan pungutan liar (Pungli) dan bentuk ketidakmampuan Pemerintah Desa dalam mengembangkan kegiatan BUMNAG untuk mengembangkan objek wisata sehingga menciptakan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa dalam Pengawasan Pengelolaan Laporan Kegiatan tidak adanya Transparansi antara Pemerintah Desa ke Badan Pengawas Desa (BPD) sehingga Pengelolaan BUMNAG tidak efektif dan tidak berjalan sesuai dengan aturan. Begitupun hasil wawancara terhadap Direktur pelaksana BUMNAG Anyar Lestari bahwa tugas ketua atau direktur BUMNAG adalah melaksanakan kebijakan yang telah ada dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMNAG itu sendiri. Sedangkan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan berbeda dengan hasil wawancara diatas. Terbukti di lapangan sebagai direktur BUMNAG dalam melaksanakan kebijakan terkadang tidak sesuai dengan aturan dan tujuan BUMNAG Anyar Lestari, begitupun dalam mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha tentang laporan kegiatan, laporan keuangan dan pembagiand ana BUMNAG yang tidak terkoordinir dengan baik sehingga pengelolaan BUMNAG ini tidak sesuai dengan tujuan BUMNAG Anyar Lestari.

Para Pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih diantara rencana-rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, menjadwalkan pekerjaan, menilai rencana-rencana aktivitas dan penganggaran. Orientasi utama dari evaluasi masukan adalah untuk membantu merencanakan sebuah program yang digunakan untuk membawa perubahan yang dibutuhkan jenis penelitian harus mengidentifikasi dan menilai pendekatan yang relevan termasuk yang sudah beroperasi dan membantu dalam memberi penjelasan dan menentukan

prioritas yang akan digunakan untuk kelanjutan dari program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat disimpulkan bahwa Pengelola BUMNAG harus disiplin seperti ketika diberikan bantuan dalam mengembangkan kegiatan usahanya agar dimanfaatkan dengan baik dan memberikan feedback dalam tujuan sama-sama mengembangkan objek wisata. Karena hal tersebut jika dilaksanakan dengan baik akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak diantaranya keuntungan bagi masyarakat sebagai pedagang di objek wisata yaitu usahanya akan ramai dengan pembeli dan pengunjung yang berkunjung serta dengan BUMNAG Anyar Lestari bahwa kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dalam fokusnya meningkatkan perekonomian masyarakat. seperti halnya diatas menyatakan bahwa masih terdapatnya hambatan yang terjadi yaitu kurangnya pengelolaan yang dilaksanakan sehingga menyebabkan perpecahan serta dukungan sarana yang masih belum memadai.

Dari hasil pengamatan peneliti menyikapi bahwa penelitian ini dalam pelaksanaan BUMNAG Anyar Lestari dalam mengembangkan desa wisata belum terlihat pengelolaan yang jelas dengan kurangnya laporan yang ada sehingga menciptakan permasalahan yang ada antara pengelola BUMNAG dan masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan kurangnya masyarakat yang tertarik dan memahami program yang dibentuk oleh BUMNAG dan tidak didukung keberadaannya di Nagori Karang Anyar. Sehingga diperlukan kerjasama semua pihak yang terlibat agar BUMNAG dapat berkembang dan mensejahterahkan masyarakat Nagori Karang Anyar.

#### *Evaluasi Proses (process evaluation)*

Evaluasi proses dilakukan untuk melihat seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana pelaksanaan program, standar operasional prosedur dan mekanisme pelaksanaan kegiatan termasuk jadwal pelaksanaan. Evaluasi proses adalah kegiatan yang dilakukan dalam program yang diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana (Hayati et al., 2015). Dengan berfokus kepada bagaimana sosialisasi, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan. Untuk membantu pencapaian dan pencapaian target suatu program, maka perlu diadakan sosialisasi program. Sosialisasi program harus menganggarisbawahi pemahaman BUMDES dengan tujuan kelompok sasaran tentang pengaturan seperti bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat desa melalui pengembangan potensi desa.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Pemerintah Nagori Karang Anyar dalam Program BUMNAG sudah melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat desa dengan tujuan untuk mengikut sertakan mereka dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk meningkatkan daya tarik wisata objek wisata karang anyar. selain itu juga dengan menciptakan SDM Pengelola yang berperan sebagai pengelola pelaksanaan kegiatan BUMNAG dalam mengembangkan desa wisata. Diantaranya dengan melakukan pelatihan mendasar seputar pemahaman mengenai BUMNAG dan apa serta manfaat diterapkannya di Nagori Karang Anyar dan mendalami peran dalam melaksanakan kegiatan usaha. Namun, sosialisasi yang dilakukan sejauh ini hanya penjabaran kepada masyarakat agar ikut serta dalam keberlangsungan BUMNAG dalam mengembangkan Desa wisata dengan feedback yang didapatkan yaitu dengan peningkatkan perekonomian yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat di Nagori Karang Anyar. Selain itu dilakukan pelatihan kepada SDM Pengelola BUMNAG dengan tujuan agar menunjang pemahaman yang lebih intens dan kreativitas dalam mengembangkan kegiatan usaha tersebut. Seharusnya kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan rutin mengingat zaman yang semakin modern akan perubahan dan kemajuan teknologi yang ada dan dengan mayoritas masyarakat pedesaan yang gagap akan teknologi meminta agar program dapat mendukung penuh kegiatan tersebut kepada masyarakat dengan sering dilakukannya sosialisasi. Begitupun terhadap SDM Pengelola agar sering dilakukannya pelatihan mendasar pengembangan kegiatan BUMNAG Anyar Lestari.



Tetapi berdasarkan Observasi peneliti di lapangan menemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan tidak rutin dan selama berjalannya program baru beberapa kali saja dilaksanakan. Begitupun dengan monitoring yang dilaksanakan tidak rutin. Monitoring program dimaksudkan untuk memutuskan apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan baik dari segi jumlah sasaran, waktu maupun keuntungan. Hasil pemeriksaan tersebut dijadikan bahan penilaian yang diselesaikan untuk menentukan tingkat pencapaian dan kekurangan pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program tahun berikutnya yang dirangkai sebagai laporan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BUMNAG dalam mengembangkan kegiatan usaha dalam pengembangan kegiatan usaha dilakukan pengecekan dan penilaian dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Monitoring kegiatan usaha terbagi menjadi 4 yakni pengelolaan kegiatan usaha retribusi kebersihan, usaha cafe, usaha perikanan air tawar dan usaha penyewaan wahana permainan. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi dan monitoring program BUMNAG dalam pengembangan desa wisata belum sesuai dengan rencana pelaksanaan dan BUMNAG belum mampu menangani kegiatan selama program berlangsung. Sosialisasi dan monitoring yang dilaksanakan masih jauh dari kata rutin yang menyebabkan permasalahan terjadinya diantaranya permasalahan kegiatan usaha yang mengalami konflik dengan masyarakat serta SDM Pengelola yang kurang memahami program dalam pelaksanaan kegiatannya.

#### *Evaluasi Produk (product evaluation)*

Tujuan Evaluasi Produk adalah untuk mengukur, menafsirkan dan menilai pencapaian suatu program (Stufflebeam, 2003). Evaluasi ini terjadi setelah program selesai dilaksanakan dan bertujuan untuk mengevaluasi kualitas hasil program secara keseluruhan ( et al., 2023). Seluruh kegiatan usaha harus dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, mandiri dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES. Hasil wawancara diperoleh bahwa sejauh ini partisipasi masyarakat masih kurang kerjasamanya dengan Pemerintah Desa dan Pengelola BUMNAG. Hal tersebut menjadi sebuah PR untuk Pemerintah dan Pengelola BUMNAG agar dapat mengevaluasi dan mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Selain itu keberadaan BUMNAG dalam melaksanakan program dan usaha tidak terlepas dari anggaran dana yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha merupakan salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Kesiapan dana usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelola usaha pun akan mengalami kemunduran. Keberadaan BUMNAG dalam mengelola kebijakan usaha ditengah masyarakat masih mengalami kendala terutama pada terbatasnya anggaran dana yang dimiliki untuk pengembangan kebijakan BUMNAG. Dibalik itu kegiatan usaha yang dilaksanakan juga tidak sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh BUMNAG, sehingga penerapannya tidak didukung dan ditentang oleh Masyarakat. perlunya musyawarah bersama dalam menentukan program pengembangan usaha yang akan dikembangkan agar masyarakat menganggap bahwa program ini dapat berpengaruh penuh dalam pengembangan desa wisata.

Selain itu program BUMNAG ini adalah program terobosan yang tidak terus- menerus mendapatkan bantuan anggaran. Anggaran yang didapatkan hanya berdasarkan dari penyertaan modal serta usaha kerjasama dalam pengembangan kegiatan. Sehingga dalam pelaksanaannya harus dengan teliti dalam memanfaatkan anggaran yang didapatkan. Hal ini sangat disesali jika pengembangan yang dilaksanakan tidak menguntungkan bagi masyarakat maupun desa wisata. BUMNAG sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala seperti omset masih rendah, hanya bisa untuk membayar petugas/karyawan yang ditugaskan untuk menjalankan kegiatan usaha dan tidak adanya keuntungan untuk kas BUMNAG sehingga unit usaha belum inovatif. Didukung dengan pengembangan kegiatan usaha yang tidak efisien dan berdampak untuk masyarakat dan desa ditambah pengelolaannya yang tidak transparansi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa BUMNAG dalam mengembangkan desa wisata sudah berjalan dengan efektif dan peningkatan kualitas pada program ini sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan wisatawan dari awal dibentuknya program BUMNAG di Nagori Karang Anyar. Tetapi walaupun program dapat dikatakan efektif belum dapat dikatakan memuaskan diakibatkan dalam mencapainya masih terdapat permasalahan didalamnya yang tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan BUMNAG yang harus diperbaiki untuk mendukung kualitas program di Nagori Karang Anyar.

## **5. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pengembangan Desa Wisata di Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dapat disimpulkan sebagai berikut :

Evaluasi konteks menunjukkan bahwa Program BUMNAG Karang Anyar sudah berjalan dengan baik tetapi masih ada beberapa aspek yang harus diperbaiki, dipertahankan dan ditingkatkan. BUMNAG Karang Anyar merupakan salah satu Nagori yang memiliki potensi alam yang indah di Simalungun.

Evaluasi masukan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMNAG ditemukan SDM Pengelola belum melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP Prosedur yang dibuat diantaranya pengembangan kegiatan usahanya. SDM pengelola BUMNAG tidak mengkoordinir pelaksanaan kegiatan usaha mengenai laporan kegiatan, laporan keuangan dan pembagian keuangan yang tidak terkoordinir dengan baik sehingga dalam pengelolaannya BUMNAG tidak Transparansi. kurangnya sosialisasi antara Pemerintah Desa, Pengelola BUMNAG dan juga masyarakat.

Evaluasi Proses menunjukkan proses BUMNAG dalam pengembangan desa wisata melalui sosialisasi dan monitoring. Adapun sosialisasi dan monitoring yang dilaksanakan BUMNAG tidak rutin dan terbukti dalam pelaksanaan BUMNAG sekitar 4 tahun ini baru sekali dilakukannya sosialisasi dan untuk monitoring dilakukan setiap tahunnya.

Evaluasi Hasil menunjukkan hasil pelaksanaan BUMNAG dalam pengembangan Desa wisata menghasilkan kehadiran BUMNAG dalam meningkatkan perekonomian masyarakat masih belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, ditandai dengan permasalahan yang ada menimbulkan perpecahan yang mengakibatkan beberapa kegiatan usaha gagal berkembang dan mengakibatkan kerugian. Walaupun dalam pelaksanaannya sudah meningkatkan wisatawan, tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang mengakibatkan kurang efektivitasnya pengembangan kegiatan yang dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S., & Jabar. (2018). *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Bawole, M. T., Permana, D. E., & Mangolo, M. C. S. (2023). Penyuluhan Peran Dan Manfaat Bumdes Dalam Pengelolaan Wisata Mangrove Park Di Desa Darunu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 70.
- Damanik, J. (2005). Penanggulangan kemiskinan melalui Pariwisata. *Pusat Studi Pariwisata UGM Yogyakarta*.
- Hayati et al. (2015). Jurnal pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(2), 113–120. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/14869/pdf>
- Heliarta. (2019). *Pembangunan Nasional* (Susilo (ed.)). Alprin.
- Kurniawati, E. W., Islam, A., & Bengkulu, N. (2021). *Evaluasi Program Pendidikan Perspektif Model Cipp ( Context , Input , Process , Product )*. 2, 19–25.
- Lagantondo, H., Pandipa, A. K. H., & Thomassawa, R. (2023). Analisis Pelaksanaan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tiwaa (Studi Kasus di Desa Tiwaa Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 25(1), 54–71. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v25i1.507>
- Mahmudi, I. (2011). CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *At-Ta'dib*, 6(1). <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v6i1.551>
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pengembangan Desa Wisata. *Publika*, 10(2), 391–406.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Noviana, I., Susilo, K. D., & Haryati, E. (2023). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Budaya di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. *Soetomo Administrasi Publik*, 197–208.
- Nugraha, A., & Kismartini, K. (2019). Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i1.5223>
- Nugroho, R. (2014). *PUBLIC POLICY: teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi dan kimia kebijakan* (5 Revisi). Elex media Komputindo.
- Saebani, A., Darmastuti, D., Maulana, A., & Setiawan, A. (2023). Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Perangkat Desa Baros. *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 1416.
- Sopia Rukmana, N., Nur Aina, A., Pratiwi Johansyah, O. N., Manda, D., & Halim, D. (2023). Penguatan Kelembagaan Bumdes: Upaya Meningkatkan Potensi Ekonomi Kreatif Di Pulau Lakkang. *Global Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 47–53. <https://doi.org/10.51577/globalabdimas.v3i2.461>
- Stufflebeam, D. L. (2003). *The CIPP Model for Evaluation*. Oregon: Annual Conference on the Oregon Program Evaluators Network (OPEN).
- Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The Cipp Evaluation Model*. The Guilford Press.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tarnando, H. (2021). Evaluasi Program Pengembangan Obyek Wisata Danau Sungai Sorik di Kecamatan Kuantan Hilir Sekarang. *Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, Dan Komputer*, 4 (1), 684–692.

Yarni, M., Kosariza, K., Arfa, N., Suhermi, S., & Febrian, R. (2023). Sosialisasi Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 3(4), 145–150. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v3i4.470>